

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual	10
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili.....	25
1. Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.....	25
2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.....	32
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Di Masa Yang Akan Datang.....	43
B. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.....	46
1. Hukum Agraria dalam Peradilan Tata Usaha Negara.....	46
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	52

C.	Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	62
1.	Putusan Sela Pengadilan Negeri.....	63
2.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	70
3.	Upaya Hukum.....	75
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A.	Memilah Persamaan Dan Perbedaan Karakteristik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Di Peradilan Umum (Perdata).....	82
B.	Teori Melebur.....	99
C.	Eksistensi Dan Tolok Ukur Mengenai Pemecahan Konflik Kompetensi Antara Peradilan Umum Dengan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia.....	103
D.	Konflik Kompetensi Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia.....	111
BAB IV	ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT DALAM PERKARA SERTIFIKAT TANAH DAN IMB DI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	125
A.	Analisa Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/PDT.G.2006/PN.BKS. Tanggal 13 Pebruari 2007.....	126
B.	Analisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2006/PTUN-BDG Tanggal 2 Maret 2007.....	136
C.	Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/B/2007/PT.TUN.JKT Tanggal 29 Oktober 2007.....	147
D.	Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105K/TUN/2008 Tanggal 31 Agustus 2008.....	152
E.	Pendapat Penulis Terhadap Putusan Tentang Kewenangan Absolut Dalam Perkara Sertifikat Tanah dan IMB Di Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara.....	161
F.	Peninjauan Kembali Sebagai Solusi Yang Tepat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pencari Keadilan.....	182
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	192
B.	Saran.....	195

DAFTAR PUSTAKA..... 196

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi
No.231/PDT.G.2006/ PN.BKS
- Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
No.63/G/2006/PTUN-BDG
- Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
No.156/B/2007/PT.TUN.JKT
- Lampiran 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.105K/TUN/2008,